

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

Safriansyah

Dosen FISIP Universitas Terbuka UPBJJ Majene

Email: safri@ut.ac.id

Abstract

PNPM is one program to accelerate poverty reduction in an integrated and sustainable. The purpose of this study is to investigate the process of implementation of PNPM Mandiri in Rural Eastern District of Banggae Majene and to identify the factors that influence it. The method used is deductive qualitative descriptive analysis method. Results reveal that the implementation of PNPM Rural in District East Banggae Majene has been implemented in accordance with the procedures set out in the process, although influenced by communication, resources, attitudes executor, and organizational structure. Communication factors, resources and organizational structure are factors that support the implementation of the program, while the attitude of factors, including the factors that inhibit the implementation of the program. However, the factors that hamper can be controlled in accordance with established procedures.

Keywords: poverty, empowerment, rural

A. Pendahuluan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah salah satu program pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Narayan (2002) mendefinisikan pemberdayaan sebagai peningkatan aset dan kemampuan orang miskin untuk terlibat dalam negosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mendorong akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Definisi tersebut mengasumsikan bahwa melalui peningkatan aset dan kemampuan tersebut, daya kemampuan orang miskin yang terlemahkan dapat meningkat kembali.

Program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan dana kepada

masyarakat untuk penataan infrastruktur, ekonomi dan sosial tetapi juga mengutamakan terjadinya proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya menuju kemandirian guna mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu, seluruh proses kegiatan dalam program ini dilakukan oleh masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengikuti prosedur atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya dengan melalui pembelajaran dan pelatihan yang difasilitasi oleh tim fasilitator.

Pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Majene dapat dikatakan telah tepat sasaran, mengingat masih banyak masyarakatnya yang tergolong miskin, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dan berdasarkan data BPS Kabupaten Majene bahwa jumlah

rumah tangga miskin di Kabupaten Majene yang merupakan rumah tangga sasaran dalam program pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil PPLS 2011, yaitu sebanyak 19.231 RT.

Tabel.
Jumlah Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2011

KECAMATAN	JUMLAH			
	SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	MENENGAH LAYAK
BANGGAE				
BANGGAE	346	402	908	2 504
TIMUR	158	173	466	1 835
PAMBOANG	430	375	754	1 084
SENDANA	350	343	660	1 405
TAMMERODO	111	170	422	714
TUBO	138	159	292	788
SENDANA	223	322	732	1 417
MALUNDA	177	195	433	745
ULUMANDA				
JUMLAH	1 933	2 139	4 667	10 492

Sumber: BPS-Majene dalam Angka, 2012

Oleh karena itu, tujuan yang ingin diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sejumlah variabel, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Organisasi. Keempat variabel tersebut merupakan variabel yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas implementasi PNPM Mandiri Perdesaan.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Deskripsi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu : peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat

menuntaskan tahapan pemberdayaan, yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Adapun tujuan khususnya, meliputi: meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; melembagakan pengelolaan dana bergulir; mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa; mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai PNPM Mandiri Perdesaan, adalah sebagai berikut: (a) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin; (b) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal); (c) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis

sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal); (c) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, yaitu faktor : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Organisasi. Keempat variabel tersebut merupakan variabel yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung mempengaruhi efektivitas implementasi program atau kebijakan (Edwards III, 1980).

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang dimaksud dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, yaitu sosialisasi dan penyebaran informasi. Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat.

Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat luas. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan, yakni Rumah Tangga Miskin; para pelaku program; instansi atau lembaga pendukung pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan lainnya, baik dari kalangan pemerintah dan swasta serta kelompok masyarakat umum lainnya.

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi

adalah dimengerti dan dipahaminya konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara utuh, khususnya masyarakat di lokasi program sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program, masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya. Dengan demikian, upaya pelebagaan dan pengintegrasian prinsip serta prosedur program dalam masyarakat dan sistem pemerintahan regular dapat berjalan optimal.

Sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dan desa dalam rangka PNPM Mandiri Perdesaan (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2009), yaitu :

1. Musyawarah Antar-Desa (MAD) Sosialisasi, yaitu pertemuan masyarakat antar desa untuk menyampaikan informasi awal mengenai tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, MAD Sosialisasi juga merupakan pertemuan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun tujuan dari MAD Sosialisasi, yaitu :
 - a. Mendiseminasikan informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan;
 - b. menginformasikan rencana program atau proyek dari kabupaten yang benar-benar akan dilaksanakan di kecamatan;
 - c. Menginformasikan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan antar desa, seperti: Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Kerjasama

- Antar Desa (BKAD), dan Setrawan Kecamatan;
 - d. Memilih dan menyepakati dua orang peserta menjadi Ketua dan Sekretaris (Notulis) MAD yang akan bertugas hingga akhir PNPM Mandiri Perdesaan;
 - e. Menyepakati dan menetapkan aturan dan sanksi-sanksi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - f. Menyepakati jadwal kegiatan musdes sosialisasi, pelatihan KPMD dan MAD prioritas usulan.
2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi, yaitu musyawarah masyarakat desa sebagai bagian sosialisasi atau penyebaran informasi PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa yang dilaksanakan segera setelah MAD Sosialisasi. Adapun tujuan dari Musdes Sosialisasi, yaitu :
 - a. Memperkenalkan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di desa;
 - b. memilih Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, Sekretaris dan Bendahara TPK;
 - c. memilih dan menetapkan 2 orang KPMD, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
 - d. menyepakati dan menetapkan jadwal musyawarah desa informasi hasil MAD prioritas usulan;
 - e. menyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan Papan Informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media informasi lainnya.
 3. Di samping itu, sosialisasi dan penyebaran informasi yang

dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan media, yaitu :

- a. Papan Informasi (PI) merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Selain sebagai sarana informasi, PI juga merupakan sarana pembelajaran (edukasi) prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tersebut.
- b. Poster menjadi media yang dapat menarik perhatian, baik karena ukurannya yang relatif besar, *layout* gambar yang menarik, serta pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, konsultan/fasilitator didorong untuk menempel poster-poster PNPM Mandiri Perdesaan di tempat umum/di tempat terbuka/di keramaian, agar dapat dilihat oleh masyarakat umum. Poster-poster program juga harus selalu dipasang di kantor-kantor konsultan/fasilitator dan tempat-tempat musyawarah berlangsung.
- c. Spanduk menjadi salah satu alternatif media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan, memberitahukan sesuatu, meningkatkan kesadaran dan membangkitkan motivasi masyarakat. Misalnya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan, meningkatkan kesadaran warga untuk turut menjaga/melestarikan hasil-hasil kegiatan, mengajak warga agar membayar pinjaman tepat waktu, dan lain-lain.
- d. Buletin, selain sebagai media pembelajaran, buletin merupakan media yang efektif untuk berbagi pengalaman/praktik terbaik (*best practices*) pelaksanaan program di lokasi. Oleh sebab itu, selain didorong untuk aktif

menyampaikan informasi perkembangan kegiatan dan kisah menarik dari lokasi masing-masing untuk dimuat dalam buletin yang dibuat di tingkat nasional, perlu diupayakan pengadaan buletin lokal (warga) secara swadaya, yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat lokal.

- e. Surat kabar merupakan media cetak yang tepat untuk sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan, karena akses masyarakat terhadap media ini cukup tinggi. Selain sebagai media sosialisasi dan penyebaran informasi, media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, buletin) atau media massa lain, dapat berfungsi sebagai kontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kecamatan Banggae Timur dapat terealisasi, di mana setiap tempat kegiatan selalu mencantumkan logo PNPM Mandiri Perdesaan pada spanduk, baliho, poster dan tugu.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, meliputi komposisi, jumlah, tugas dan kewenangan staf dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur. Adapun sumber daya manusia yang mengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, terdiri atas : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) = 1 orang, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) = 2 orang, Tim Verifikasi (TV) = 2 orang, Pendamping Lokal (PL) = 1 orang, Fasilitator Kecamatan (FK) = 1 orang, Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec) = 1 orang, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) = 2 orang, dan Badan Kerja sama Antar

Desa (BKAD) = 3 orang (lihat struktur organisasi PNPM Mandiri Perdesaan Banggae Timur pada Gambar 4.2). Berdasarkan informasi di atas, staf yang mengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur dapat dilihat bahwa jumlah stafnya sudah cukup dan komposisinya juga sudah cukup. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing staf di setiap unit juga sudah dirinci berdasarkan Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor ini melihat sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program yang dilaksanakan, khususnya bagi mereka para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur. Para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur disebut dengan fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang memiliki sikap yang baik, seorang fasilitator harus menyadari dan memahami fungsinya di masyarakat. Adapun sikap fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur di lapangan berdasarkan fungsi yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu :

1. Sebagai Narasumber

Seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan program, dalam hal ini PNPM Mandiri Perdesaan. Seorang fasilitator harus mampu menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran atau nasehat yang kongkrit dan realistis agar mudah diterapkan.

2. Sebagai Guru

Fungsi sebagai guru seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan

pelaksanaan program. Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap.

3. Sebagai Mediator

a. Mediasi potensi

Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat memediasi sehingga masyarakat bisa mengakses potensi-potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pengembangan dirinya, misalnya : sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, peluang pasar.

b. Mediasi berbagai kepentingan

Seorang fasilitator diharapkan juga dapat berperan sebagai orang yang dapat menengahi apabila diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan. Perlu diingat fungsi ini bukan berarti fasilitator yang memutuskan tetapi hanya perlu mengingatkan masyarakat tentang konsistensi terhadap berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Arti lain adalah menyesuaikan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Jika diperlukan seorang fasilitator bisa membantu masyarakat dengan memberikan berbagai alternatif kesepakatan dalam menyesuaikan berbagai kepentingan demi tercapainya tujuan bersama. Untuk itu seorang fasilitator harus netral dan tidak memihak kepada salah satu kelompok saja.

c. Sebagai Perangsang atau Penantang (*Challenger*)

Sering ditemui bahwa masyarakat jarang mengetahui dan mengenal potensi dan kapasitasnya sendiri. Untuk itu seorang fasilitator harus mampu merangsang dan

mendorong masyarakat untuk menemukan dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri. Dengan fungsinya tersebut fasilitator mampu mendorong masyarakat sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri. Tetapi di satu sisi, seorang fasilitator harus dapat berfungsi sebagai animator yakni ketika masyarakat sudah secara penuh/mandiri dapat memutuskan segala sesuatu tanpa bayang-bayang intervensi fasilitatornya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi-fungsi di atas maka seorang fasilitator perlu memiliki beberapa kemampuan, antara lain :

1. Kepemimpinan

Seorang fasilitator juga akan menjalankan fungsi kepemimpinan di masyarakat sehingga seharusnya memiliki kapasitas untuk membuka visi, membimbing, memberi motivasi, menggerakkan sekaligus berperan sebagai mediator antar warga masyarakat dan pihak lain yang diperlukan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan, antara lain :

- a. Dengan menambah pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan.
- b. Belajar sendiri dengan banyak membaca buku.
- c. Banyak menimba atau mempelajari pengalaman dari luar (studi banding, seminar- seminar)
- d. Harus tanggap, dapat menjabarkan ide-ide, konsep dan kebijakan.
- e. Melatih diri dengan berpikir kreatif, berpikir orisinal dan selalu berwawasan masa depan - *visionary*.
- f. Tahan dan berjiwa besar menerima kritik dari luar.

2. Konseptual

Yang dimaksud kemampuan konseptual adalah kemampuan

menerjemahkan pemikiran dan konsep yang rumit menjadi mudah diterima/dipahami oleh masyarakat serta merangsang lahirnya ide-ide baru untuk perubahan di masyarakat yang positif.

3. Komunikasi

Termasuk dalam kemampuan komunikasi yang dibutuhkan, yaitu:

a. Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi

Fasih dan jelas dalam menyampaikan pesan, informasi, ide atau gagasan (intervensi informasi) kepada masyarakat merupakan syarat mutlak seorang fasilitator dalam menjalankan proses fasilitasi. Dengan kemampuan itulah fasilitator akan dapat menjelaskan dan memberikan kontribusi kepada anggota dan kelompok masyarakat.

b. Menjadi pendengar yang aktif

Jika seorang fasilitator mampu menjadi pendengar yang aktif maka sangat memungkinkan akan tahu apa yang terjadi dan peka terhadap perasaan dan emosi dibalik ungkapan kata yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan mengetahui apa yang terjadi dan peka terhadap perasaan dan emosi dibalik ungkapan kata yang disampaikan oleh masyarakat menjadi dasar untuk mengambil sikap dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Untuk menjadi pendengar yang baik dan aktif diperlukan suatu pengendalian terhadap emosi atau perasaan diri serta bisa menghargai setiap pendapat dan gagasan yang disampaikan masyarakat.

c. Bertanya efektif dan terarah

Dengan bertanya secara efektif akan memudahkan seorang fasilitator untuk belajar dan

mengerti apa yang terjadi serta sekaligus dapat memberi pemahaman untuk dapat memilih dan menemukan alternatif tindakan. Bertanya efektif dan terarah dapat dilakukan jika fasilitator telah menguasai dan memahami program yang disampaikan.

d. Kemampuan dalam pengembangan masyarakat

Beberapa kemampuan yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu :

- ✓ Mengenal isu-isu lokal
Seorang fasilitator perlu memahami benar serta menghayati isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan sehingga mengenal apa yang harus dan bisa dilakukan oleh masyarakat.
- ✓ Kemampuan identifikasi
Kemampuan mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan dan fenomena yang terjadi merupakan awal dan bekal seorang fasilitator dalam melakukan pemberdayaan dan fasilitasi di masyarakat. Kemampuan ini diperlukan untuk pendekatan kepada masyarakat agar program (PNPM Mandiri Perdesaan) berjalan optimal.
- ✓ Kemampuan analitis
Melalui proses analitis maka seorang fasilitator akan dapat mengantisipasi masalah, menemukan berbagai alternatif penyelesaian serta mampu menjadi prakarsa dalam upaya pemberdayaan.
- ✓ Adaptasi partisipatif
Menyesuaikan diri dengan kondisi, harapan dan karakteristik masyarakat dalam PNPM Mandiri

Perdesaan merupakan bekal yang sangat positif dalam fasilitasi. Hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat berupa keterlibatan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan serta dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan program. Di sisi lain keberadaan masyarakat sebagai orang dewasa menuntut fasilitator untuk dapat melibatkan pemikiran dan aksi mereka agar dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan program.

- ✓ Berpandangan positif ke depan (*visioner*)
Selalu berpandangan secara positif dalam banyak hal sehingga tidak mudah terjebak pada pengambilan posisi pada setiap masalah secara sebagian-sebagian dan hanya didasarkan pada kepentingan sesaat/jangka pendek saja, tetapi segala sesuatu dipandang secara utuh didasarkan pada tujuan yang jauh ke depan.
- ✓ Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis
Seringkali “dengan kata” saja dirasa tidak cukup karena di beberapa hal menuntut bukti. Begitupun dengan masyarakat, seorang fasilitator perlu sesekali melakukan sesuatu sebagai wujud sebuah pernyataan untuk bukti keberadaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Untuk itu, fasilitator perlu memiliki kemampuan teknis, sebagai berikut :

- a. Tahu dan mampu bagaimana sesuatu harus dikerjakan
 - b. Ahli dalam bidangnya dan berpengalaman
 - c. Paham akan ketentuan/peraturan yang berlaku
 - d. Mampu mengendalikan proses pelaksanaan pekerjaan
 - e. Secara fisik dan mental siap menghadapi tugas operasional
 - f. Memiliki daya tahan, ketekunan, keuletan dalam penyelesaian tugas.
- ✓ Kemampuan hubungan antar manusia (*human relationship*) Seorang fasilitator harus memiliki kapasitas untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Berkaitan dengan bagaimana memperlakukan dan berinteraksi dengan mereka serta menempatkan mereka dengan prinsip kesetaraan.

d. Faktor Struktur Organisasi

Faktor ini melihat adanya struktur organisasi dan SOPs (*Standard Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika dalam hal ini SOPs tidak ada maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan, karena segala sesuatu yang bersifat *ad hoc* akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang jelas. Struktur organisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur, yaitu susunan yang memperlihatkan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain, atau memperlihatkan tugas staf yang satu dengan yang lainnya dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur didasarkan pada tugas, fungsi dan pokok masing-masing staf yang ada di dalam struktur organisasi. Sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana. Selain itu, struktur organisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur memberikan informasi kepada masyarakat mengenai siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banggae Timur tersebut. Sehingga ada bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

C. Penutup

PNPM Mandiri Perdesaan adalah salah satu program pemerintah dalam membantu dan menanggulangi masyarakat miskin dengan menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Dalam proses implementasinya, PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dimulai dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, pelatihan sampai evaluasi kegiatan. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur secara umum dipengaruhi oleh faktor : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi.

Adapun faktor yang mendukung dalam program tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur organisasi. Sedangkan faktor yang menghambat, yaitu sikap pelaksana.

Oleh karena itu, Pemberdayaan masyarakat pada setiap desa berbeda-beda antar satu desa dengan yang lainnya sehingga indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan harus menyesuaikan dengan karakteristik desa itu dan karakteristik program yang dijalankan. Masyarakat selaku pelaksana sekaligus kelompok sasaran program pemberdayaan, belum sepenuhnya memahami keberdayaan dan tingkat kemandirian untuk mengelola pembangunan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, peran dan keberadaan fasilitator pendamping masih dibutuhkan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dan bahkan membudaya dengan proses-proses pemberdayaan yang dijalankan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan. (2004). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Bappenas.
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2009). *PTO PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Depdagri.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Majene dalam Angka. (2012). Diambil 2 Desember 2012, dari <http://majenekab.bps.go.id/inde>
[x.php/flip-book/majene-dalam-angka](http://majenekab.bps.go.id/inde).
- Mazmanian, Daniel and Sabatier, Paul A. (1986). *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction : A Sourcebook*. Washington: The World Bank.
- PNPM Mandiri Perdesaan. (2012). Diambil 2 Desember 2012, dari www.pnpm-perdesaan.or.id.
- Ripley, Randall and Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Illionis: The Dorsey Press.
- Royat, Sujana. (2009). *Majalah Komite*, edisi 1 Maret 2009.
- Sekilas Kabupaten Majene. (2012). Diambil 2 Desember 2012, dari www.majenekab.go.id.
- Sen, Amartya. (2002). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.